

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

_____. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed. 2, Cet. 16. Jakarta: Sinar Grafika.

Makarao, M.T. & Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 2. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

_____. 2014. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Rejama Rosdakarya.

Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Afdhali, Dino Rizka & T. Syahuri. 2023. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), Hal. 555-561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

Agustina, Shinta. 2015. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Masalah-masalah Hukum*. Jilid 44, No. 4, Oktober 2015. Hal. 503-510.

Angkasa, 2010. "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10, No. 3, September 2010. Hal. 213-221.

Ardika, I Gede Darmawan, dkk. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1, No. 2, Oktober 2020. Hal. 286-290.

- Ashari, A. 2017. "Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana", *Al Hikam*. Vol. 1, No. 3, 2017. Hal. 1-18.
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, dkk. 2025. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia". *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Publik*, Vol. 4, No. 1, 2025. Hal. 68-79.
DOI: <https://doi.org/10.47498/constitutio.v4i1.4949>
- Bawono, Bambang Tri. 2011. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan". *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011, Hal. 550 - 570.
- Cendy, Kuat Puji Prayitno dan Setya Wahyudi. 2020. "Efektivitas Program Aksi Penanggulangan Dan Pemberantasan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Nusakambangan". *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 6, No. 2, Oktober 2020. Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Hal. 1-28.
- Djiwandono, Delvino Aldy dkk. 2024. "Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024. hal. 12066 – 12080.
DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Gunawan, Roni dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 3, Tahun 2019. Fakultas Hukum Universitas diponegoro. Hal. 337-351.
- Herman, Yosia. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Lex Privatum*. Vol. V, No. 2, Maret-April 2017. Hal. 131-138.
- Irfani, Nurfaik. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum". *Jurnal LEGISLASI Indonesia*. Vol. 16, No. 3, September 2020, Hal. 305-325.
- Kaeng, Briean Imanuel, dkk. 2022. "Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan". *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2022. Hal. 1-8.
- Khalid, Afif. 2014. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Al'Adl*, Vol. VI, No. 11, Januari-Juni 2014. Hal. 9-36.

- Kristiyanti, Marlina dan Vieta Imelda Cornelis. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya". *Binamulia Hukum*. Vol. 12, No. 1, Juli 2023. Hal. 201-211. DOI:10.37893/jbh.v12i1.331.
- Kusumawardhani, D. L. Levi Heningdyah Nikolas & Sumartini Dewi. 2023. "Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)". *UNES Law Review*, 6(2), Hal. 4197-4203.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1025>
- Lokas, Richard. 2015. "Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Et Societatis*. Vol. 3, No. 9, Oktober 2015. Hal. 124-129.
- Muslih, M. 2013. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch". *Jurnal Legalitas*, Vol. IV, No. 1, Juni 2013. Hal. 130-152.
- Nugroho, Hibnu. 2008. "Merekonstruksi Sistem Penyidikan Dalam Peradilan Pidana (Studi Tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sistem Penyidikan Di Indonesia)". *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 26, No.1, Januari 2008.
- Pantow, Fernando Louis. 2018. "Hubungan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 4, Juni 2018. Hal. 40-46.
- Prasetyo, Catur. 2017. "Putusan Hakim Tentang Barang Bukti dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Cilacap)". *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2017. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Hal. 642-655.
- Pratama, Muhamad Syahriful Dedi, dkk. 2024. "Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tuban (Studi Kasus Di Polres Tuban)". *Justitable*. Vol. 7, No. 1, Juli 2024. Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. Hal. 1-13.
- Raharjo, Agus dan Angkasa. 2011. "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011. Hal. 389-401.
- Rayfindratama, Alva Dio. 2023. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan". *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Juni 2023. Hal. 1-17.
DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>

- Sepang, Giant K. Y. 2015. "Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHP". *Lex Crimen*. Vol. IV, No. 8, Oktober 2015. Hal. 103-110.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. 2004. "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27, September 2004. Hal. 82-96.
- Soeganda, Susiana. 2018. "Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol. 8, No. 2, Spetember 2018. Hal. 52-83.
- Sofyanoor, Andien dan Sri Wuriyanti. 2024. "Implementasi Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Pada Polresta Banjarmasin". *Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial*. Vol. 2, No. 2, Juli 2024. Hal. 212-221.
- Sudikma, I Kadek, dkk. 2020. "Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1, No. 1, Juli 2020. Hal. 46-51.
- Sukmadadi, Mas Diding Eki, dkk. 2023. "Pembuktian Unsur Melawan Hukum Dalam Delik Narkotika Secara Terorganisasi". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 24, No. 2, Oktober 2023. hal. 237 – 249. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1>
- Surya, Ida dan Abdul Wahab. 2023. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Baik". *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol. 8, No. 2, Desember 2023. Hal. 108-117.
- Taurisanto, A. Y., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. 2023. Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1). Hal. 140-163. <https://doi.org/10.52103/jlt.v4i1.1533>
- Trenggono, Bagus. 2017. Perampasan Barang Bukti Narkotika (Studi Penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Purbalingga). (Tesis, Universitas Jenderal Soedirman).
- Umar. 2020. "Administrasi Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polres Palopo (Studi Kasus Polres Palopo)". *Jurnal I La Galigo*. Vol. 3, No. 1, April 2020. Hal. 41-47.

Watulingas, Ruddy R. dan Diana R. Pangemanan. 2021. “Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. IX, No. 8, Juli 2021. Hal. 100-109.

Sumber Internet

Bura, Michael Gala. (2024). “Pengurusan Barang Rampasan Negara Dengan Nilai Wajar Sampai Dengan Rp 35 Juta”. diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 20.00. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju/baca-artikel/16828/Pengurusan-Barang-Rampasan-Negara-Dengan-Nilai-Wajar-Sampai-Dengan-Rp35-Juta.html>

Munawaroh, Nafiatul. Hukum Online. (2024). “Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?”, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 21.18, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/>

Prabowo, Dimas. Radar Banyumas. “Kasus Narkoba di Banyumas Meningkatkan Sepanjang 2024 Polisi Tangkap 164 Tersangka”. <https://radarbanyumas.disway.id/read/127329/kasus-narkoba-di-banyumas-meningkat-sepanjang-2024-polisi-tangkap-164-tersangka>.

Pusiknas. “Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-main dengan Negara”. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba_bnn_jangan_main-main_dengan_negara#:~:text=Sejak%20awal%202024%2C%20Polri%20menindak,dan%20peredaran%20narkoba%20di%202024

Septian, Rhino. BNN Kepulauan Riau, (2023). “Manfaat Penggunaan Narkoba Dalam Dunia Medis di Indonesia”. diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 20.00. <https://kepri.bnn.go.id/manfaat-penggunaan-narkoba-dalam-dunia-medis-di-indonesia/>

Sjarif, Fitriani Ahlan. Hukum Online. (2022) “Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia”. diakses pada tanggal 10 Agustus 2025 pukul 22.00. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

_____, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

_____, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi

_____, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

_____, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

_____, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

_____, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

